Sanksi Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Parkir Jalan Umum di Kota Palu

Legal Sanctions Against the Practice of Illegal Parking Fees on Public Streets in Palu City

Deden Rahmat Pratama^{1*} | Ida Lestiawati² | Moh. Nafri³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

✉ deden.rahmat@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu dan untuk mengetahui dan hambatan penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagaimana menurut Pasal 71 Ayat 1a Perda tersebut, juru parkir yang tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, tidak mengenakan atribut resmi (seperti rompi dan tanda pengenal), serta tidak memberikan karcis parkir yang sah, dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Kurungan paling lama 15 hari, atau Denda paling banyak Rp. 2.500.000. Adapun Hambatan penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu yaitu a) Keterbatasan personel penegak hukum, b) Tidak maksimalnya sistem parkir resmi, c) Lemahnya sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum d) Sulitnya pendataan dan pengawasan lapangan. Saran penelitian yaitu seyogyanya pemerintah membuat regulasi mengenai sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir di jalan umum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pungutan juru parkir liar di Kota Palu serta tidak beroperasi kembali sebagai juru parkir illegal. Seyogyannya Penegak hukum dan instansi terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir liar di jalan umum Kota Palu, sehingga tidak mengganggu dan meresahkan serta memberikan rasa aman masyarakat selaku pengendara di jalan umum.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Pungutan Liar, Parkir

Abstract: The purpose of the study is to determine and analyze the application of legal sanctions against the practice of illegal parking fees on public roads in Palu City and to determine and the obstacles to law enforcement against the practice of illegal parking fees on public roads in Palu City. The research method uses empirical juridical research that uses primary data and secondary data which are then presented in the form of an inductive thinking pattern, namely from specific things to general things. The results of the study found that the application of legal sanctions against the practice of illegal parking fees on public roads in Palu City Palu is regulated in the Regional Regulation (Perda) of Palu City Number 6 of 2023 concerning the Implementation of Traffic and Road Transportation. as according to Article 71 Paragraph 1a of the Regulation, parking attendants who do not have a recommendation from the Transportation Agency, do not wear official attributes (such as vests and identification), and do not provide valid parking tickets, can be subject to criminal sanctions in the form of: Imprisonment for a maximum of 15 days, or a maximum fine of IDR 2,500,000. The obstacles to law enforcement against the practice of illegal parking fees on public roads in Palu City are a) Limited law enforcement personnel, b) Suboptimal official parking system, c) Weak legal sanctions against the practice of illegal parking fees on public roads d) Difficulty in data collection and field supervision. The research suggestion is that the government should make regulations regarding stricter sanctions against violations committed by parking attendants on public roads so as to provide a deterrent effect for perpetrators of illegal parking fees in Palu City and not operate again as illegal parking attendants. Law enforcement and related agencies should increase supervision and control of illegal parking attendants on public roads in Palu City, so as not to disturb and disturb and provide a sense of security for the public as drivers on public roads.

Keywords: Legal Sanctions, Illegal Levies, Parking

Received: 02 Aug, 2025

Revised: 30 Aug, 2025

Accepted: 10 Sept, 2025

Publish: 15 Sept, 2025

Publisher: Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palu

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan public yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan pengembangan di bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap system transportasi yang ada dan perpajakan yang merupakan elemen penting dari system transportasi tersebut.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Palu, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan transportasi, tempat parkir yang dicari oleh masyarakat bagi yang memiliki kendaraan dalam melakukan kegiatannya. Hal inilah yang membuat lahan parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menggiurkan di tambah jumlah peningkatan kendaraan di Kota Palu dari tahun ke tahun selalu bertambah, sehingga semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, sejalan dengan itu jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Kota Palu juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan parkir.

Dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir Pasal 1 poin 2 mengatakan bahwa Pengelolaan Parkir adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan perpajakan. Kemudian pada Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 mengatakan bahwa:

Pemerintah Daerah berwenang mengelola parkir meliputi a. Parkir di tepi jalan umum; b. Parkir Khusus; dan c. Parkir Insidentil. Kemudian parkir tersebut diselenggarakan oleh swasta atau perorangan dengan ketentuan wajib mendapat izin dari DPMPSTP yang melampirkan rekomendasi dari Dinas.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB I Pasal 1 Ayat (15) Mendefinisikan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Tempat parkir dapat diadakan dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Walikota. Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perpajakan sebagai kegiatan pelayanan umum. Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud, Walikota dapat menunjuk dan atau menugaskan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang ditunjuk dan atau ditugaskan dalam penyelenggaraan perpajakan sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dan wajib memiliki ijin dari Walikota.

Kota Palu merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, parkir merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kota Palu memiliki banyak pertokoan salah satunya adalah Minimarket. Sering dijumpai di berbagai jenis minimarket di Kota Palu telah menyediakan lahan parkir secara gratis namun masih saja banyak oknum juru parkir liar yang meminta secara paksa untuk membayar tarif parkir.

Saat ini ada dua bentuk juru parkir yang umumnya dijumpai, seperti juru parkir resmi serta juru parkir liar. Pertama juru parkir resmi, sering mengenakan seragam dengan organisasi atau lambang daerah di lengan kanan atau kiri. Pemerintah daerah atau organisasi yang menjalankan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir resmi, yang hadir di tempat yang seharusnya. Kedua juru parkir liar, sering tidak memiliki seragam, dan ketika seseorang ingin pulang atau pergi, mereka muncul dan meminta uang. Hadirnya Juru parkir illegal dikarenakan sejumlah faktor, termasuk ekonomi dan peluang bagi orang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara individu atau organisasi.

Parkir liar kerap kali tidak memiliki surat izin yang resmi dari pemerintah setempat, hal ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang mana disebutkan "penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang

diberikan.” Penyelenggara parkir yang tidak memiliki izin dalam artian tidak ada karcis parkir yang dikeluarkan oleh Pemda. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara illegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah Kabupaten atau Kota serta uang parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Penyelenggara parkir liar dapat dijatuhkan dengan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tukang parkir memaksa untuk memberikan uang parkir.

Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir merupakan pelanggaran hukum. Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Pungutan liar oleh juru parkir di Kota Palu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan masyarakat timbul karena juru parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dengan jelas dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir.

Di sisi lain dalam fakta sosial masih sering ditemukan juru parkir yang melakukan pungutan liar di tempat parkir tepi jalan umum di Kota Palu, penegakan hukum pidana yang dilakukan juga tidak bisa dirasakan secara jelas oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Tentu hal ini menimbulkan keresahan karena tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Palu.

METODE

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Pengkajian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Parkir Jalan Umum di Kota Palu

Pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Pungutan liar cenderung mengarah pada Tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Moh Iqbal, SH Selaku PS Kasubnit II Unit II Harda Satreskrim Polresta Palu, yang menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, yaitu:

Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pungutan liar adalah perbuatan yang dilarang (tindak pidana)

Adanya budaya masyarakat yang lebih mudah memaafkan serta mengikhhlaskan.

Tidak adanya keberanian dalam diri masyarakat dalam melaporkan perbuatan pungutan liar.

Faktor ekonomi yaitu penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar. Dalam kehidupan sosial masyarakat cenderung abai dan bahkan sering kali memahami perbuatan pungutan liar ini dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah dengan alasan kasihan dan tidak mau ribet. Tentunya, hal ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan tertentu. Kebiasaan masyarakat yang baik serta pemaaf inilah yang menjadikan pungutan liar tumbuh subur dalam pelayanan publik.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa Kota Palu memiliki banyak pertokoan salah satunya adalah minimarket, selain itu juga terdapat pasar tradisional di beberapa titik jalan Kota Palu. Sering dijumpai di berbagai jenis minimarket, pertokoan dan pasar tradisional di Kota Palu yang telah menyediakan lahan parkir secara gratis, namun masih saja banyak oknum juru parkir liar yang meminta secara paksa untuk membayar tarif parkir.

Pungutan liar oleh juru parkir liar adalah kegiatan pengenaan biaya parkir oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki otoritas resmi atau izin dari pihak berwenang untuk mengatur dan memungut biaya parkir. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdul Muin selaku BA Unit I Subnit II Jatanras Satreskrim Polresta Palu, yang menjelaskan bahwa:

Praktik ini dilakukan secara ilegal, seringkali di area publik atau swasta tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik atau pemerintah. Transaksi tidak disertai dengan bukti pembayaran resmi seperti karcis parkir atau tanda bukti lain yang diakui oleh otoritas yang berwenang.

Dari hasil uraian wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa juru parkir liar di minimarket, pertokoan maupun pasar tradisional belum memiliki data diri yang legal misalnya rompi maupun kartu identitas yang tercatat dalam Dinas Perhubungan. Pemungutan retribusi dilakukan oleh juru parkir liar untuk menarik tarif parkir supaya memperoleh keuntungan pribadi, maka hal itu jelas terjadi aktivitas ilegal.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar ini berdasarkan aturan yang tertuang pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan sebagai instrumen hukum yang memuat larangan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap juru parkir liar yang melakukan pungutan liar. Sehingga dapat dijadikan landasan dan pedoman oleh aparat penegak hukum dalam menindak dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pungutan liar yang telah dilakukan.

Adapaun dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku juru parkir liar di kota Palu, sebagaimana menurut Pasal 17 Perwali Nomor 35 tahun 2021 bahwa diberikan kewenangan kepada unsur Polisi dan unsur Satpol PP untuk melakukan pengendalian dan pengawasan tindak pidana termasuk pelanggaran hukum setempat. Maka dari itu juru parkir liar di minimarket, pertokoan dan pasar tradisional di Kota Palu, akan diberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban juru parkir. Selain itu unsur Polisi juga mempunyai tugas dan fungsi melakukan patroli pengawasan, melakukan pembinaan dan penertiban parkir yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan penertiban parkir liar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dani Desnarudi selaku BA Unit I Subnit II Jatanras Satreskrim Polresta Palu, yang menjelaskan bahwa:

Penerapan sanksi hukum terhadap praktik pungutan liar (pungli) parkir di jalan umum Kota Palu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perda ini menetapkan sanksi tegas bagi juru parkir liar yang tidak memenuhi ketentuan resmi.

Penerapan sanksi praktik pungutan liar (pungli) parkir di jalan umum Kota Palu sebagaimana menurut Pasal 71 Ayat 1a Perda tersebut, juru parkir yang tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, tidak mengenakan atribut resmi (seperti rompi dan tanda pengenal), serta tidak memberikan karcis parkir yang sah, dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Kurungan paling lama 15 hari, atau Denda paling banyak Rp2.500.000.

Kemudian praktik pungutan liar (pungli) parkir yang disertai intimidasi dan anacaman di jalan umum termasuk tindakan melanggar hukum dan merupakan Tindakan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyebutkan bahwa:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Sehingga dalam hal ini pungli parkir liar bisa masuk kategori pemerasan, apabila jika disertai intimidasi atau ancaman agar orang membayar. Parkir merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari alat transformasi, seiring bertambahnya jumlah penduduk semakin banyak pula orang yang memiliki kendaraan pribadi, hal ini menyebabkan permintaan tempat parkir juga meningkat, terutama ditempat yang padat penduduk dan memiliki aktifitas ekonomi. Ketika jumlah kendaraan bertambah tanpa diiringi oleh penambahan tempat parkir yang memadai, ini dapat menciptakan kelebihan parkir dan menciptakan peluang bagi para juru parkir liar untuk melakukan pungutan liar. Sehingga banyak masyarakat yang merasa resah dan terganggu dengan kehadiran pungutan parkir liar tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan 2 (dua) orang masyarakat yang keberatan dengan parkir liar tepi jalan kota Palu, yang mengatakan bahwa:

Kami sebagai masyarakat tentu saja merasa sangat terganggu dengan kehadiran juru parkir liar di tepi jalan, karena adanya pungutan tidak resmi tanpa karcis dan tarif yang tidak jelas serta ancaman atau pemaksaan secara halus, terutama jika menolak membayar.

Dari uraian tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan hadirnya juru parkir liar di tepi jalan umum kota Palu tentu saja sangat mengganggu dan ketidaknyamanan masyarakat. Karena pungutan tidak resmi tanpa karcis dan tarif yang tidak jelas serta melakukan ancaman atau pemaksaan kepada pengendara apabila menolak membayarnya.

Juru parkir liar memang kerap menjadi masalah di banyak daerah khususnya di kota Palu dan bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. Mereka dianggap meresahkan karena memungut uang tanpa legalitas. memasang tarif tidak jelas dan sering melewati batas, menguasai trotoar atau jalan umum, serta ada beberapa kasus di mana juru parkir liar bersikap kasar atau intimidatif, dan ini menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Tidak adanya izin resmi merupakan salah satu indikator utama dari praktik pungutan liar oleh juru parkir. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok yang mengatur parkir di suatu area tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah daerah. Tanpa izin resmi ini, mereka tidak memiliki legitimasi untuk mengenakan biaya parkir atau mengelola area parkir tersebut secara sah.

Kondisi ini sering kali mengarah pada penentuan biaya parkir yang tidak terkendali dan tidak teratur, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna kendaraan yang harus membayar biaya tanpa jaminan pelayanan atau keamanan yang memadai. Keberadaan juru parkir tanpa izin resmi juga dapat menciptakan masalah hukum dan ketidaknyamanan di masyarakat, karena tidak ada pengawasan atau perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pengguna kendaraan dalam hal pengaturan parkir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan terkait izin parkir guna menghindari praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat secara umum.

Penggunaan tempat parkir umum secara ilegal oleh juru parkir merupakan praktek yang sering terjadi di banyak kota. Ini terjadi ketika individu atau kelompok mengklaim kendali atas area parkir umum seperti jalan umum, trotoar, atau lahan milik umum tanpa memiliki izin atau hak yang sah dari pihak berwenang. Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta mengurangi ruang bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, penyalahgunaan tempat parkir umum dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan menciptakan risiko keamanan, terutama jika tempat parkir yang digunakan ilegal terletak di lokasi strategis atau padat aktivitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengatur penggunaan tempat parkir umum secara ketat, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap praktik ilegal ini guna menjaga keteraturan dan kenyamanan bagi masyarakat umum.

Tindakan juru parkir liar yang melakukan pungutan liar telah menimbulkan akibat yang merugikan dan meresahkan masyarakat, mengganggu sistem prekonomian, menghambat pembangunan daerah, menciptakan masalah sosial dan memicu tindak pidana. Selain merugikan masyarakat, juru parkir liar yang melakukan pungutan liar juga merugikan negara karena juru parkir liar tidak pernah menyetorkan hasil pemingutan dari lahan parkir yang dijaga oleh juru parkir liar tersebut. Nantinya pendapatan dari hasil perparkiran yang telah terkumpul tersebut akan diambil seluruhnya untuk pendapatan pribadinya sendiri dan tidak disetorkan atau dapat dikatakan sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Biasanya juru parkir liar melancarkan aksinya pada lokasi-lokasi yang ramai pengunjung, seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar berkepanjangan akan menciptakan kebiasaan atau budaya buruk pada perilaku masyarakat.

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Parkir Jalan Umum di Kota Palu

Penegakan hukum terhadap pungli parkir di jalan umum tidak hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga menuntut reformasi sistem pengelolaan parkir, penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta partisipasi aktif

masyarakat. Namun dalam prakteknya dalam Upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di jalan umum kota Palu masih menghadapi faktor penghadap, di antaranya adalah:

Keterbatasan personel penegak hukum

Keterbatasan personel penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam Upaya penegak hukum terhadap juru parkir liar di tepi jalan umum kota Palu, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Moh Ikbal, SH Selaku PS Kasubnit II Unit II Harda Satreskrim Polresta Palu, yang menjelaskan bahwa:

Jumlah unsur Polis, petugas Dishub, Satpol PP, dan PPNS yang ditugaskan dalam pengawasan dan pengendalian parkir di jalan umum masih terbatas dibandingkan luas wilayah dan banyaknya titik parkir liar. Sehingga sanga sulit untuk melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh.

Dari uraian hasil wawancara tersebut bahwa keterbatasan personel penegak hukum merupakan salah satu hambatan utama dalam menanggulangi praktik parkir liar di berbagai kota, termasuk di Kota Palu, di mana Kota dengan jumlah jalan dan titik parkir yang luas, memerlukan pengawasan dan pengendalian yang intensif. Akibatnya apabila Lokasi wilayah tidak bisa diawasi secara rutin, maka juru parkir liar akan bebas beroperasi.

Selain itu fokus penugasan yang terbagi petugas penegak hukum juga mempengaruhi masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir liar. Petugas penegak hukum tidak hanya mengawasi parkir, tetapi juga menangani ketertiban umum, penertiban pedagang kaki lima, penegakan protokol lalu lintas, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan lancarnya lalu lintas. Parkir liar bisa muncul di luar jam kerja petugas, seperti malam hari atau akhir pekan. Sehingga apabila tidak ada sistem pengawasan bergilir atau patroli 24 jam, maka pelaku parkir liar memanfaatkan celah waktu ini untuk beroperasi.

Tidak maksimalnya sistem parkir resmi

Selain faktor keterbatasan personel penegak hukum di atas, faktor tidak maksimalnya sistem parkir resmi juga menjadi salah satu pengahambat dalam Upaya penegakan juru parkir liar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dani Desnarudi selaku BA Unit I Subnit II Jatanras Satreskrim Polresta Palu, yang mejelaskan bahwa: Hingga saat ini sistem karcis parkir belum sepenuhnya berbasis digital maupun transparan. Kurangnya fasilitas pembayaran non-tunai dan informasi tarif resmi membuat masyarakat bingung membedakan antara parkir resmi dan parkir liar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ketidakjelasan tarif dan mekanisme pembayaran terkadang membuat masyarakat bingung dan rawan dimanfaatkan oleh oknum juru parkir liar karena tarif parkir sering tidak terpampang secara resmi. Selain itu masih banyak tepi jalan kota Palu khususnya di minimarket, pertokoan dan pasar tradisional belum sistem parkir belum terintegrasi dengan aplikasi atau teknologi digital, seperti e-parking. Akibatnya pembayaran tunai langsung kepada juru parkir membuka peluang besar untuk terjadinya pungli.

Lemahnya sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum

Lemahnya sanksi hukum terhadap praktik pungutan liar (pungli) parkir di jalan umum memang menjadi perhatian publik, karena meskipun ada regulasi yang mengatur, namun sanksinya masih belum tegas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dani Desnarudi selaku BA Unit I Subnit II Jatanras Satreskrim Polresta Palu, yang menjelaskan bahwa:

Sanksi terhadap juru parkir liar datur dalam Pasal 71 Ayat 1a Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Kurungan paling lama 15 hari, atau Denda paling banyak Rp.2.500.000.

Dari uraian wawancara di atas bahwa menurut penulis sanksi hukum terhadap juru parkir yang diatur dalam Perda tersebut masih terbilang ringan dan belum tegas. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pungutan juru parkir liar di Kota Palu. Hal ini tentu saja membuat pelaku cenderung tidak takut dan tetap beroperasi.

4. Sulitnya pendataan dan pengawasan lapangan

Sulitnya pendataan dan pengawasan lapangan menjadi faktor [engahmabat dalma Upaya penegakan hukum terhadap pungutan juru parkir liar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muin selaku BA Unit I SUBNIT II Jatanras Satreskrim Polresta Palu, yang menjelaskan bahwa:

Banyak titik parkir muncul secara tidak resmi dan insidental, terutama saat ada acara, pasar malam, atau di daerah rawan macet. Sehingga sulit memetakan dan mengidentifikasi juru parkir liar karena tidak tercatat secara administratif.

Sulitnya pendataan dan pengawasan lapangan terhadap juru parkir liar merupakan kendala serius dalam upaya penertiban dan penegakan hukum di sektor perparkiran di Kota Palu. Banyak juru parkir liar tidak terdaftar di Dinas Perhubungan atau tidak memiliki izin/rekomendasi resmi. Mereka muncul secara insidental atau musiman, misalnya saat pasar malam, event besar, atau akhir pekan. Tidak ada basis data atau identitas yang bisa dilacak, sehingga menyulitkan pengawasan dan penindakan.

Selain itu mobilitas tinggi dan lokasi yang sulit dijangkau sehingga juru parkir liar berpindah-pindah tempat untuk menghindari razia. Mereka sering beroperasi di lokasi-lokasi rawan seperti gang sempit, dekat pasar tradisional, daerah pemukiman padat, dan sekitar pertokoan dan pusat keramaian yang tidak terjangkau patrol.

Belum adanya sistem digital (seperti GPS atau database juru parkir) membuat pengawasan hanya bisa dilakukan secara manual dan reaktif. Kemudian laporan masyarakat pun kadang kurang akurat atau terlambat ditindaklanjuti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah personel penegak hukum tidak sebanding dengan jumlah titik parkir liar yang harus diawasi. Patroli tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan atau di luar jam kerja normal. Sulitnya pendataan dan pengawasan terhadap juru parkir liar adalah akibat dari lemahnya sistem dan keterbatasan sumber daya. Sehingga membutuhkan kombinasi antara, pendekatan teknologi, kebijakan yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat.

Mengingat masih banyaknya juru parkir liar yang melakukan pungutan liar dapat menyebabkan bahaya bagi masyarakat yang menggunakan lahan parkir, maka cara praktis untuk memberantas juru parkir liar yang melakukan pungutan liar adalah penyebaran informasi tarif resmi seperti memasang papan informasi yang jelas tentang tarif parkir resmi di setiap lokasi parkir, serta melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif juru parkir liar, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan perparkiran yang berlaku, hal ini menyebabkan masyarakat tidak segan untuk memberikan uang kepada juru parkir liar karena tidak mengetahui aturan perparkiran yang berlaku. Kebiasaan masyarakat yang memberikan uang kepada juru parkir liar tersebut dapat membuka celah bagi pelaku untuk memanfaatkan situasi dan menarik uang dari pengendara secara ilegal.

KESIMPULAN

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Parkir Jalan Umum di Kota Palu Palu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perda ini menetapkan sanksi bagi juru parkir liar yang tidak memenuhi ketentuan resmi. Penerapan sanksi praktik pungutan liar (pungli) parkir di jalan umum Kota Palu sebagaimana menurut Pasal 71 Ayat 1a Perda tersebut, juru parkir yang tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, tidak mengenakan atribut resmi (seperti rompi dan tanda pengenal), serta tidak memberikan karcis parkir yang sah, dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Kurungan paling lama 15 hari, atau Denda paling banyak Rp. 2.500.000.

Hambatan penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu yaitu a) Keterbatasan personel penegak hukum, b) Tidak maksimalnya sistem parkir resmi, c) Lemahnya sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum d) Sulitnya pendataan dan pengawasan lapangan.

SARAN

Seyogyanya pemerintah membuat regulasi mengenai sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir di jalan umum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pungutan juru parkir liar di Kota Palu serta tidak beroperasi kembali sebagai juru parkir ilegal.

Seyogyannya Penegak hukum dan instansi terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir liar di jalan umum Kota Palu, sehingga tidak mengganggu dan meresahkan serta memberikan rasa aman masyarakat selaku pengendara di jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Bunga Putri Islam, Anang Dony Irawan, Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 1 No 2, 2023
- M.F.N. Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Mohammad Riyan Hidayatulloh, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liaroleh Penyelenggara Parkir Ilegal, Jurnal LegisiaVolume 15 Nomor 1 Tahun 2023,
- Warpani, S., Rekayasa Lalu Lintas, Bahatara Karya Aksara, Jakarta 2017